




# ANTARA MACET, PARKIR LIAR, DAN PKL

PEMBANGUNAN 262 TAHUN KOTA JOGJA

Kota Jogja genap berusia 262 tahun. Tepatnya pada 7 Oktober 2018. Beragam pembangunan, baik fisik maupun sosial, terus digencarkan pemerintah setempat dari waktu ke waktu. Belakangan, pembangunan fisik yang kian masif justru dinilai sebagai sumber ketidaknyamanan oleh sebagian masyarakat

PENGELOLAAN parkir, penataan pedagang kaki lima (PKL), dan kemacetan lalu lintas menjadi bidang ketidaknyamanan Kota Jogja. Kendati demikian, tak sedikit warga yang menilai pembangunan dan pemataan wilayah Kota Jogja sudah baik. Berdasarkan hasil polling yang diselenggarakan Radar Jogja guna menyambut HUT ke-262 Kota Jogja, 24,3 persen dari total 200 responden menyatakan kondisi wilayah dan pemataan Kota Jogja sudah baik. Sementara 57,6 persen menilai masih diperlukan upaya peningkatan pemataan. "Kondisi wilayah Kota Jogja sudah baik, tetapi Kota wilayah Jogja masih buruk" - Bocor Antara... Hal 7



Tindak Lanjut	
perera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta, .....

Pt. Kepala  
Sekretaris

Ttd

**Ig. Trihastono, S.Sos, MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005

MAHKOTA, Wakil Kota dan Wakil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dan Herbe Poehwadi memaknai

Nah, dari mereka yang menyatakan kondisi tata kota Jogja baik didominasi soal pengaturan lalu lintas atau kemacetan. Sebesar 37,7 persen. sementara 34,1 persen tentang penataan PKL, dan 24,2 persen mengenai pengelolaan parkir kendaraan di tempat umum. Sisanya, 4 persen abstain.

Di bagian lain, 39,1 persen dari 152 responden yang menyatakan tata wilayah Kota Jogja buruk dan perlu ditingkatkan lagi menitikberatkan pada masalah pengelolaan parkir. Terutama keberadaan kantong-kantong parkir dan jukir liar. Sedangkan 37,9 persen lainnya soal kemacetan lalu lintas. Dan 20,2 persen mengenai penataan PKL. Sedangkan 2,8 persen responden abstain.

Meski jalanan kerap dilanda kemacetan tiap jam berangkat dan pulang kerja/sekolah, mayoritas responden menyatakan penataan lalu lintas di Kota Jogja sudah baik. Dengan persentase 60,7 persen. Bahkan 2,9 persen lainnya menilai sangat baik. Namun, tak sedikit pula yang menilai buruk, yakni 31,7 persen. sedangkan 4,7 persen dari total responden menyatakan sangat buruk.

Berbeda dengan pengelolaan parkir. Di mana separo atau 50 persen responden menyatakan buruk dan 7,6 persen sangat buruk. Kendati demikian, 37,1 persen responden menilai pengelolaan parkir Kota Jogja sudah baik dan 2,9 persen menyatakan sangat baik. Sedangkan 0,6 persen tak memberikan penilaian.

Sebanyak 84 responden menilai pengelolaan parkir sudah

baik dan sangat baik. Dari jumlah tersebut, 30,4 persen di antaranya cenderung melihat lokasi/ketersediaan kantong-kantong parkirnya. Sedangkan 21,7 persen soal perilaku juru parkir (jukir), dan 20,3 persen ihwal ketentuan tarifnya. Sementara 27,6 persen menyatakan ketiga hal tersebut baik semua.

Lain halnya dengan 116 responden yang menilai pengelolaan parkir Kota Jogja buruk dan sangat buruk. Ada tiga hal yang menurut 35,8 persen responden buruk. Yakni kondisi lokasi parkir, perilaku jukir, dan masih adanya jukir yang melakukan praktik *nuthuk* tarif parkir. Sementara 20,1 persen fokus pada hal *nuthuk* tarif parkir, 24,7 persen soal kondisi area parkir, dan 19,4 persen tak menyukai sikap sebagian jukir.

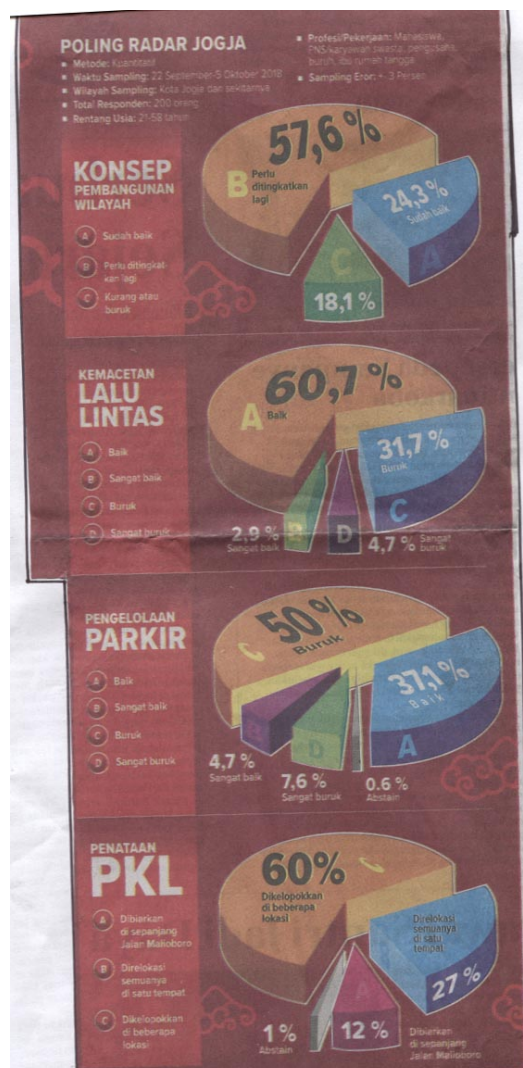
Tentang penataan PKL, satu hal yang masih hangat dalam perbincangan publik Kota Jogja adalah para pedagang di kawasan Malioboro. Pemkot Jogja berencana merelokasi mereka di lahan bekas Bioskop Indra. Dengan membangun semacam mal PKL. Tak semua responden dalam poling *Radar Jogja* sepakat dengan kebijakan pemkot. Hanya 27 persen yang menyatakan sepakat jika PKL direlokasi semuanya di satu tempat. Sementara 60 persen lainnya berharap para PKL dikelompokkan di beberapa lokasi. Sedangkan 12 persen responden ingin para PKL dipertahankan di sepanjang Jalan Malioboro seperti saat ini. Sisanya, 1 persen abstain.

Lepas dari pro kontra pengelolaan parkir, sebagian besar

responden sepakat, Pemkot Jogja harus menyeleksi calon jukir. Hal ini guna antisipasi jukir liar dan praktik *nuthuk* di luar tarif resmi. Para jukir harus dibekali kartu identitas sebagai bentuk legalitas. Sedangkan sorotan bagi PKL Malioboro lebih pada faktor kebersihan. Karena masih ada PKL yang buang sisa maka-

nan tidak pada tempatnya. Sementara untuk masalah kemacetan lalu lintas, Pemkot Jogja diharapkan segera membenahi sistem transportasi kendaraan umum. Sarana yang ada harus dikemas lebih menarik. Selain itu, membatasi jumlah kendaraan dari luar Kota Jogja. Saat ini Pemkot Jogja telah menetapkan

kebijakan *car free day* di titik-titik tertentu tiap Minggu. Salah satunya di Jalan Jenderal Soedirman. Kebijakan ini akan lebih baik jika ke depan pemkot juga menetapkan Hari Khusus Transportasi Umum. Hal ini diyakini akan mengurangi kemacetan lalu lintas, meski hanya sehari. (tim radar jogja/yog/fj)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005